

Editorial

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di perguruan tinggi diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, di samping penelitian dan pendidikan. Menurut Standard Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi harus memenuhi delapan standard dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya ke delapan standard tersebut menetapkan rambu-rambu yang harus diikuti yang meliputi kriteria minimal dalam hal hasil, isi, proses, penilaian, pelaksanaan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pendanaan.

Namun, realita pelaksanaan sebagian kegiatan PkM masih jauh dari standard yang ditetapkan. Pertama, terdapat kesan seolah-olah kegiatan PkM hanya kegiatan sampingan yang berada di level lebih rendah di bawah bidang pendidikan dan penelitian, sehingga menyebabkan PkM dilaksanakan sekedarnya saja. Kedua, tiadanya keragaman dan matangnya konsep atau “metodologi” perencanaan dan pelaksanaan PkM yang berakibat pada kemandegan terhadap inovasi kegiatan PkM, misalnya saja hanya mengulang terus pelaksanaan PkM melalui kegiatan pelatihan ketrampilan secara terus menerus. Ketiga, pelaksanaan PkM yang berkelanjutan dengan pendampingan masih perlu digalakkan, yang pada kenyataannya masih sangat terhambat oleh sistem pendanaan yang terlalu kaku yang membuat upaya pendampingan masyarakat tidak dapat berkelanjutan. Berkaca dari realita di atas, nampaknya sudah saatnya diperlukan upaya pengembangan sistem pengelolaan dan kapasitas pelaku kegiatan PkM yang dapat dimotori oleh tiap-tiap perguruan tinggi.

Jurnal Bakti Budaya Volume 1, No. 1, 2018 ini memuat delapan artikel utama dan lima laporan pendek (dalam rubrik Tanduk Alit) pelaksanaan PkM sebagai desiminasi dan berbagi pengalaman pelaksanaan PkM. Artikel P.M. Laksono dan Anggraeni memaparkan proses dan hasil kegiatan PkM yang menekankan pada keaktifan dan inisiatif masyarakat dalam menjawab persoalan-persoalan sosial budaya yang dihadapinya. Anggraeni menekankan upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi, sedangkan P.M. Laksono lebih menekankan pada pendekatan Riset Aksi Partisipatoris bagi penyelesaian persoalan sosial budaya komunitas Sumba. Artikel lainnya menjabarkan pelaksanaan PkM dengan metode pelatihan kebahasaan untuk meningkatkan ketrampilan dan kapasitas komunitas-komunitas tertentu yang dipandang membutuhkannya, antara lain dalam artikel yang ditulis oleh Daru Winarti, Ni Gusti Ayu Roselani, dan B.R. Suryo Baskoro bersama Hayatul Cholsy. Artikel-artikel yang ditulis oleh Musadad dan Widya Nayati lebih menunjukkan sebuah intervensi pelaku PkM terhadap institusi dan komunitas tertentu. Musadad mencoba menawarkan solusi persoalan kemacetan lalu lintas pengunjung dan pengelolaan pengunjung di makam Sunan Kalijaga, Demak, sedangkan Widya Nayati mengenalkan potensi “pembacaan” relief candi bagi pengembangan bermusik kelompok komunitas musik. Pendekatan *Service Learning*, sebagai sebuah upaya menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap pengabdian kepada masyarakat yang diintegrasikan dalam sebuah mata kuliah, dipaparkan dalam artikel yang ditulis Endah Setyowati bersama Alviani

Permata. Semoga artikel-artikel dalam Jurnal Bakti Budaya kali ini memberi warna dan inspirasi bagi pelaksanaan PkM selanjutnya. Selamat membaca. (Tjahjono Prasodjo)